

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis Menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kecurangan (*Fraud*) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta diawali dengan penyelidikan yang dilakukan oleh APIP/SPI atas dasar aduan dari masyarakat ataupun Audit yang wajib dilakukan oleh APIP/SPI itu sendiri dan tindakan awal biasanya diselesaikan oleh Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Yogyakarta itu sendiri jika terkait tindakan yang belum merugikan pihak lain yang dimaksud dalam hal ini tindak kecurangan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan itu sendiri yaitu Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai tindakan pelanggaran dan dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan berat tindakan pelanggaran yang dilakukan dan penerimaan Sanksi Administratif, Pihak Barang/Jasa Pemerintah tetap melakukan Proyek tersebut sehingga menurut penulis hal dalam mengatasi hal ini masih belum optimal dikarenakan pihak yang sudah diketahui melakukan Tindakan

Kecurangan (Fraud) masih memiliki peluang dalam melakukan Tindakan Kecurangan lain.

2. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya diberikan waktu terbatas yang ditentukan didalam surat tugas dan juga kemampuan yang dimiliki juga masih kurang dalam melakukan penyelidikan oleh badan tersebut sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian tindak kecurangan (*fraud*) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Yogyakarta
3. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian tindakan kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Yogyakarta adalah melakukan diklat secara berkala dan juga melaksanakan Probity Audit yang dilaksanakan setiap adanya Proyek dalam Pengadaan Barang dan Jasa itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya penyempurnaan peraturan terkait Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pengadaan Barang dan Jasa terkait dari terciptanya sistem (*e-procurement*) dan peraturan dalam pemberian sanksi administratif khusus yang diberikan

kepada Instansi Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti melakukan Tindak Kecurangan (*Fraud*) serta dihapus haknya dalam pelaksanaan suatu Proyek yang terbukti telah dilakukannya Tindakan Kecurangan (*Fraud*) tersebut.

2. Perlunya memberikan daftar hitam terkait pihak penyedia yang telah terbukti melakukan Tindakan Kecurangan (*Fraud*) secara Nomor Induk Kependudukan dikarenakan seseorang yang sama yang pernah terlibat dalam Tindakan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa dapat mendaftar lagi dengan nama perusahaan yang berbeda.
3. Perlunya pengembangan dari berbagai aspek dalam Tindakan Penyelesaian Kecurangan (*Fraud*) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta seperti dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia agar lebih kompeten dan ahli dalam pengawasan, penyelidikan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Andi Tenri Famauri Rifai, 2022, *Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik*, CV. Bintang Semesta Media, Jakarta
- Diky Anandya dan Lalola Easter, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- F .H. Edy Nugroho, 2019, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, Jakarta
- I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Jakarta
- Johan Arifin, dkk, 2020, *Implementasi E-Procurement dan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa*, Ekonisia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- M. Jusly Penus Sagala, 2009, *Perbuatan Dianggap Korupsi Beserta Penjelasannya*, Deepublish, Yogyakarta
- Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visimedia, Jakarta
- Tuanakotta dan Theodorus M, 2014, *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*, Selemba Empat, Jakarta
- W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3817. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 54. Sekretariat Kabinet. Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan

Barang atau Jasa Pemerintah. Berita Negara 2018 Nomor 18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Jakarta

SURAT KEPUTUSAN

Keputusan Inspektur Jendral Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-18.OT.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jendral Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

JURNAL

- Amin Sapto Saputro dan Ulung Pribadi, 2022. Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang, *Indonesian Governance Journal*, Vol 05/ No 01/April/2022, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Krishna Darari Hamonangan Putra, 2019, Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurist Diction* Vol. 2 No 4, Juli 2019, Universitas Airlangga
- Ni Luh Putu Indah Trisna Dewi, Made Pebri Anggriyani, I Dewa Ayu Eka Septyastini, Ni Made Sinta Gayatri, Kadek Dian Sudiari, Kadek Dwi Andika, 2018, "Fraud Triangle Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Psada Dinas Kabupaten Buleleng)", *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika*, Vol. 8 No 2, Agustus 2018, Universitas Pendidikan Ganesha
- Petrus Aji Brata, 2018, Analisis Hukum Terhadap Fraud (Kecurangan) Dalam E-Procurement di LPSE Kabupaten Trenggalek, *Jurnal Supremasi*, Vol 8 No 1, Maret 2018, Universitas Islam Blittar
- Rimbun Siallagan, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi, 2022, Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol 1 No. 2 , Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

TESIS

- Ainun Komala Indah, 2023, *Peran Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Control Plan (Studi Kasus Pada BPKP DKI Jakarta)*, Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
- Indri Novitasari, 2018, *Pengaruh Penerapan Sistem E-Procurement Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE Sleman Tahun 2018*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putri Sekarrini, 2022, *Analisa Penerapan Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)*, Tesis, Universitas Darma Persada Jakarta